

**LITERASI HAK-HAK POLITIK KAUM PEREMPUAN (STUDI  
PADA PROGRAM PEMBANGUNAN PEREMPUAN DAN  
KEPEMUDAAN DI DPD PKS KOTA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Pada  
Program Studi Politik Islam**

**Oleh:**

**TIARA**

**NIM. 2020404027**

**FAKULTAS ADAB & HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG**

**1445 H / 2024**

Nomor: B-254/Un.09/IV.3PP.009/02/2024

**SKRIPSI**

**LITERASI HAK-HAK POLITIK KAUM PEREMPUAN (STUDI PADA PROGRAM PEMBANGUNAN PEREMPUAN DAN KEPEMUDAAN DI DPD PKS KOTA PALEMBANG**


Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

**TIARA**  
NIM. 2020404027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 12 Februari 2024

**Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji**


Ketua Dewan Penguji

  
Dr. Ahmad Svukri, S.IP., M.Si  
NIP. 197705252005011014


Sekretaris

  
Muchlis Minako, M.Hum  
NIDN. 2022099203

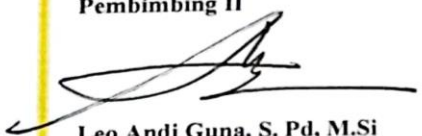
Pembimbing I

  
Dr. Kiki Mikail, MA  
NIP. 198409212019031004

Penguji I

  
Dr. Andi Candra Java, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19720119 200701 1 011

Pembimbing II

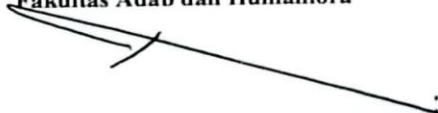
  
Leo Andi Guna, S. Pd, M.Si  
NIP. 197607312003121002

Penguji II


  
Afif Musthofa Kawwami, M.Sos  
NIP. 199302272022031001

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)  
Tanggal, 12 Februari 2024

Dekan  
Fakultas Adab dan Humaniora

  
Prof. Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum  
NIP. 197107271997032005

Ketua Program Studi  
Politik Islam

  
Dr. Ahmad Svukri, S.IP., M. Si  
NIP. 197705252005011014

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing skripsi

1. Dr. Kiki Mikail, M.A  
NIP. 198409212019031004
2. Leo Andi Guna, S.pd., M.Si  
NIP. 197607312003121002

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul LITERASI HAK-HAK POLITIK KAUM PEREMPUAN (STUDI PADA PROGRAM PEMBANGUNAN PEREMPUAN DAN KEPEMUDAAN DI DPD PKS KOTA PALEMBANG) yang ditulis oleh:

Nama : Tiara  
Nim : 2020404027  
Jurusan : Politik Islam

Untuk diajukan dalam sidang Manaqosah.

Palembang, Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Kiki Mikail, M.A**  
NIP. 198409212019031004

**Leo Andi Guna, S.pd., M.Si**  
NIP.197607312003121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara  
Tempat & Tanggal Lahir : Pauh, 07 Mei 2002  
Nim : 2020404027  
Program Studi : Politik Islam  
Judul Skripsi : Literasi Hak-Hak Poilitik Kaum Perempuan  
(Studi Pada Program Pembangunan Perempuan Dan Kepemudaan Di DPD PKS Kota Palembang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan arahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang ditulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Adab & Humaniora UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 30 Januari 2024

  
Tiara  
NIM. 2020404027

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Apapun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu”**

**(Ali bin Abi Thalib)**

### **PERSEMBAHAN**

**Dengan rasa syukur dan ucapan terimakasih, skripsi ini penulis**

**Persembahkan Kepada:**

1. Allah SWT, yang selalu memberi nikmat serta jalan petunjuk disetiap tantangan hidup yang saya hadapi.
2. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan saya do'a dan selalu memberikan dorongan terbaik untuk keberhasilan saya, semoga Allah memberikan kalian keselamatan dunia dan akhirat.
3. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang secara keseluruhan, khususnya Fakultas Adab & Humaniora Program Studi Politik Islam.

## **ABSTRACT**

The title of this research is "Literacy of Women's Political Rights (A Study on Women and Youth Development Program at the PKS Regional Board in Palembang)." This research aims to explore issues related to the literacy of women's political rights, focusing on the women and youth development program at the PKS Regional Board in Palembang. The theoretical foundation of this research encompasses political rights theory, gender politics, and development politics.

The research methodology applied is a qualitative approach, involving the collection of primary data through direct interviews with representatives from the PKS Regional Board and the community. Secondary data is obtained from various documents, literature, journals, articles, and relevant websites. Data analysis includes the processes of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification to obtain research results.

The research findings indicate that knowledge of political rights plays a crucial role in stimulating women and youth development activities, contributing to literacy in political rights, gender equality, and formulating effective strategies for recruiting and educating political cadres. The implemented programs are considered positive steps in supporting women's political rights literacy and creating positive changes in society.

**Keywords:** Political rights literacy, Women and youth development, Community, DPD PKS Palembang City

## **ABSTRAK**

Judul penelitian ini ialah Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan (Studi pada Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang). Penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan seputar literasi hak politik kaum perempuan dengan memfokuskan pada program pembangunan perempuan dan kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang. Landasan teoritis penelitian mencakup teori hak politik, politik gender, dan politik pembangunan.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak DPD PKS dan masyarakat. Sementara data sekunder diambil dari berbagai dokumen, literatur, jurnal, artikel, dan situs internet yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk mendapatkan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hak politik berperan penting dalam merangsang kegiatan pembangunan perempuan dan kepemudaan memberikan kontribusi pada pengetahuan literasi hak politik, kesetaraan gender, dan merumuskan strategi efektif untuk merekrut serta mendidik kader-kader politik. Program-program yang diimplementasikan dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung literasi hak politik perempuan dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Literasi hak politik, Pembangunan perempuan dan kepemudaan, Masyarakat, DPD PKS Kota Palembang

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACK .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metodologi Penelitian .....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	19
A. Hak Politik.....	19
B. Politik Gender .....	25
C. Politik Pembangunan.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI .....	33
A. Gambaran Umum Kota Palembang.....	33
B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .....	34
C. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang.....	36
D. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .....	37
E. Makna Lambang Baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .....	38
F. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang .....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan Dan Kepemudaan Di DPD PKS Kota Palembang.....	42



<b>B. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Program DPD PKS Tentang Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan Dan Kepemudaan.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Logo DPD PKS Kota Palembang

Gamabr 1.1 Stuktur organisasi DPD PKS Kota Palembang Periode 2020-2025

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Rasa syukur dan puji tertuju kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada semua yang hidup di bumi ini. Setelah melewati setiap detik perjalanan perkuliahan, akhirnya saya berhasil menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa calon sarjana melalui penyusunan skripsi dengan judul “Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan (Studi Pada Program Pembangunan Perempuan Dan Kepemudaan Di DPD PKS Kota Palembang)” Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dilaksanakan sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Jurusan Politik Islam di Fakultas Adab & Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, melalui tulisan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M. Si
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Adab & Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
3. Yang terhormat Ketua Jurusan Politik Islam Fakultas Adab & Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Ahmad Syukri, S.IP.,M.Si

4. Bapak Dr. Kiki Mikail, M.A selaku pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, teliti, dan ikhlas.
5. Bapak Leo Andi Guna, S.pd., M.Si selaku pembimbing 11 yang telah membimbing dan memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini dengan sabar, teliti dan ikhlas.
6. Pihak DPD PKS Kota Palembang Bapak Jumono, ST selaku sekretasi dan Ibu Fitri Damayanti, SE selaku Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga yang telah menerima dan memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini.
7. Teruntuk diriku sendiri terimakasih karena sudah bertahan dan begitu kuat sampai saat ini. Kamu hebat Tiara.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Asli dan Ibu Rita tersayang yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilan saya dalam setiap hal. Terimakasih banyak karena sudah menjadi orang tua yang kuat, hebat dalam hidup saya yang tak henti-hentinya berkorban banyak demi anak bungsunya. Ucapan terimakasih ini takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan, cinta, kasih sayang kalian selama ini.
9. Saudara laki-laki saya Kak Rojali dan istrinya Yuk Rhevi yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilan saya.
10. Saudara laki-laki saya Kak Riko dan istrinya Yuk Tika yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilan saya.

11. Kedua Alm Kakek dan kedua Almh Nenek saya yang telah meninggal dunia, semoga selalu ditempatkan disisi yang paling baik dan indah. Amiin.
12. Keponakan saya Fadli, Wilkis, Rafardhan Athalla, dan Syakira yang selalu membuat saya bahagia dengan leluconnya semoga menjadi anak yang sholeh dan sholeha serta menjadi kebanggan orang tua.
13. Sepupu saya Kak Billi, Monica, Sisi yang telah memberikan motivasi semangat dan bantuan laptop demi kelancaran kuliah saya.
14. Kepada Puteh Leni dan Gemok Andari terimakasih sudah peduli dan menemani saya semasa kuliah di Palembang ini.
15. Sahabat seperjuangan saya anak-anak mama Rahmiati Silmi, Putri Dewi, Yuniar Larasati dan Depi Septiana yang telah menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk kost di belakang Alfamart Rawa Jaya pintu nomor 07. Terimakasih sudah menjadi rumah singgahku selama perkuliahan. Terimakasih karena sudah menjadi tujuan untuk berkumpul kami sepulang MK, serta terimakasih untuk tumpangnya selama ini.
17. Keluarga besar Politik Islam 2020. Terimakasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama 4 tahun ini.
18. Terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dan terkait dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, motivasi, bimbingan dan doa semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dan telah memberikan nikmat di dunia dan akhirat. Dan saya mengakui

masih banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka dari itu, saya mohon kritik dan nasehat bimbingan dari manapun dalam penulisan skripsi ini. Dan saya mohon kepada Allah untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Palembang, 16 Januari 2024

Penulis

Tiara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki individu, termasuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan pemecahan masalah, pada tingkat kecakapan tertentu yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, literasi erat kaitannya dengan kecakapan berbahasa. Fokus di sini adalah pada literasi dasar, melibatkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung, sehingga memungkinkan individu meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung (Digital, 2019)

Literasi umumnya didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, namun pada era saat ini, definisi tersebut sudah tidak memadai, terutama jika dikaitkan dengan teknologi informasi. Definisi literasi ini sangat bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhi, seperti masyarakat, fasilitas, kebutuhan, dan fungsinya. Ketika kita mengurai pengertian tentang literasi informasi, Amerika Serikat, sebagai tempat kelahiran konsep literasi informasi, menjelaskan bahwa pada dasarnya konsep literasi informasi dirancang untuk merespons pertumbuhan informasi yang semakin tidak terkendali, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Try Septiyantono, 2014)

Menurut Elizabeth Sulzby (1986), literasi dapat diartikan sebagai kemampuan berbahasa seseorang dalam berkomunikasi, seperti membaca, berbicara, menyimak, dan menulis, sesuai dengan tujuannya, dengan cara yang berbeda. Dalam pengertian singkat, literasi didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca.

Alberta menyatakan bahwa literasi memiliki arti sebagai kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif untuk mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendefinisikan literasi sebagai seperangkat keterampilan nyata, terutama dalam membaca dan menulis, yang tidak tergantung pada konteks dan siapa yang memperoleh keterampilan tersebut.

Tujuan dari literasi adalah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui membaca informasi yang bermanfaat, meningkatkan pemahaman seseorang dalam menafsirkan informasi yang mereka baca, meningkatkan kemampuan memberikan penilaian kritis terhadap tulisan, membantu membentuk dan mengembangkan moral yang baik dalam diri seseorang, dan meningkatkan nilai kepribadian melalui kegiatan membaca dan menulis. Selain itu, literasi juga bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan budaya literasi di masyarakat secara luas, membantu



meningkatkan efektivitas penggunaan waktu, serta memberikan manfaat tambahan seperti peningkatan perbendaharaan kata, optimalisasi kinerja otak melalui kegiatan membaca dan menulis, perolehan wawasan dan informasi baru, peningkatan kemampuan interpersonal, peningkatan pemahaman makna informasi, peningkatan kemampuan verbal, peningkatan kemampuan analisis dan berpikir, peningkatan daya fokus, dan peningkatan kemampuan merangkai kata dan menulis.

Munculnya kesadaran yang mendasar akan pentingnya kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia, baik dari perspektif historis maupun sosiologis, menunjukkan bahwa tingkat literasi menjadi faktor krusial dalam mendukung keunggulan dan kemajuan suatu bangsa beserta masyarakatnya. Kesadaran ini juga mencerminkan pemahaman bahwa kemajuan individu, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh adanya tradisi dan budaya literasi yang positif. Dukungan dari komunitas-komunitas yang peduli dan bersemangat untuk mempromosikan kegiatan, tradisi, dan budaya literasi di lingkungan masyarakat dan pendidikan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan literasi. Dengan literasi, seseorang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap informasi yang diterima, membantu mereka berpikir secara kritis, dan mendukung pengembangan nilai-nilai budi pekerti yang baik (Fahri Abdillah, 2022)

Menurut Peter Merkl, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan adil. Di sisi lain, dalam

bentuk yang buruk, politik menjadi perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan pribadi.

Politik diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Sudut pandang lain menyatakan bahwa politik juga merupakan upaya warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Oleh karena itu, hak politik diartikan sebagai hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap individu untuk meraih dan merebut kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang bermanfaat bagi dirinya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Hak ini dilakukan berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Warga negara diberikan hak politik karena pada dasarnya setiap individu yang menjadi warga negara memiliki hak-hak tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam situasi ini, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya baik melalui ungkapan lisan maupun tulisan. Hak politik ini menjadi suatu cara dan jalur bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka serta berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemberian hak politik oleh Negara memiliki tujuan untuk

mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak melanggar hak-hak rakyat dan memberikan peluang yang sama dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Hak politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih
- b. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan
- c. Hak untuk menyampaikan pendapat
- d. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
- e. Hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya
- f. Hak untuk berkumpul dan berserikat
- g. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.

Meskipun demikian, terdapat kendala dalam implementasi hak politik, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terkait penggunaan hak mereka. Faktor-faktor seperti politik uang, kurangnya sosialisasi, dan kondisi sosial budaya juga memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat. Upaya perbaikan penerapan hak politik warga negara dapat dilakukan dengan pemerintah memberikan jaminan dan tanggung jawab dalam memfasilitasi hak warga negara, serta melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum. Selain itu, warga negara juga memiliki peran dalam memastikan pemenuhan hak mereka, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, serta aktif dalam mempertanyakan kepada pemerintah sesuai tataran kebijakan yang relevan.

Mendengar istilah "perempuan" menjadi sangat menarik untuk dijelajahi karena informasi terkait perempuan tidak terlepas dari tanggung jawab Negara. Sejarah perempuan, khususnya sebelum era Islam, menunjukkan ketidaksetaraan hak baik dari segi hukum maupun posisi mereka sebagai sesama manusia. Dalam konteks zaman sekarang, negara diharapkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan, terutama dalam pembahasan hak politik perempuan. Namun, ironisnya, hak-hak perempuan saat ini cenderung kurang mendapat perhatian dari negara, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hak politik perempuan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa perempuan masih rentan menjadi kelompok yang terpinggirkan (Mustafa As Sibay, 1962)

Bicara mengenai perempuan, banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak masih termasuk dalam kelompok rentan yang sering menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, dan kekerasan. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Bahkan dalam konteks zaman sekarang, perempuan seringkali dianggap sebagai kelompok yang berada di kelas kedua (subordinat), sehingga hak-hak mereka tidak dianggap setara dengan laki-laki. Mereka sering hanya dianggap memiliki keahlian dalam pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Meskipun demikian, perempuan memiliki potensi sebagai aktor strategis dalam pembangunan, baik di tingkat desa maupun secara nasional, yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan membuktikan bahwa keberadaan mereka patut diperhitungkan. Kecerdasan dan kepiawaian perempuan Indonesia, khususnya, tidak dapat dianggap enteng karena mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan (Ratih Prabosiwi, 2015)

Partisipasi yang rendah dari perempuan di lembaga-lembaga politik menyebabkan berbagai kepentingan perempuan jarang diperhitungkan dalam sejumlah keputusan politik. Hal ini disebabkan oleh cenderungnya keputusan politik bersifat maskulin dan kurang memperhatikan perspektif gender. Sebagian besar, jika tidak semua, keputusan politik juga selalu melibatkan perempuan sebagai kelompok sasaran. Dampaknya, perempuan mengalami keterbatasan dalam akses pada seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi hasil pembangunan. Kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan juga menjadi terbatas bagi perempuan (Muhaimin, 2009)

Isu pembangunan selalu menjadi topik yang terus diperbincangkan, baik di negara-negara terbelakang, negara berkembang, maupun negara maju. Meskipun konteks dan metodenya berbeda-beda, tujuan mendasar pembangunan tetap sama, yaitu mengarahkan negara dari kondisi aktual saat ini menuju keadaan yang dianggap lebih baik secara normatif. Pentingnya peran pemuda dalam proses pembangunan tidak dapat disangkal dan bahkan dianggap sebagai faktor penentu. Partisipasi pemuda dalam setiap tahap pembangunan sering dikaitkan dengan usaha untuk

memupuk rasa memiliki terhadap infrastruktur yang sedang dibangun. Rasa memiliki ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip dasar pembangunan adalah memberikan keadilan dan kemakmuran kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin atau status ekonomi, baik laki-laki maupun perempuan, dan kepada yang kaya maupun yang miskin (Afriandi Setiawan, 2011)

Peneliti sengaja memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia sebagai subjek penelitian, mengingat bahwa PKS merupakan salah satu partai Islam di negara ini dan telah lama terlibat dalam dunia politik sejak awal gerakan Tarbiyah di beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah dan muncul pada awal 1980-an pada masa Orde Baru. Gerakan Tarbiyah dapat dianggap sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam. Untuk memahami posisi PKS dalam konteks gerakan Islam lainnya, perlu dicermati konteks politik saat itu. Perlu diingat bahwa pada masa itu, pemerintah Orde Baru menekan aktivitas Islam Politik, yang merujuk pada kecenderungan sebagian umat Islam yang aktif dalam sektor politik dengan membawa aspirasi agama Islam (Sibghatullah Arrasyid, 2020)

Saat ini, fakta yang tampak justru menunjukkan bahwa proses pembangunan semakin meningkatkan disparitas keadilan sosial di antara masyarakat berpendapatan rendah dan tinggi, antara perempuan dan laki-laki, serta antara kelompok berkuasa dan masyarakat umum. Kesenjangan gender dalam pembangunan menjadi nyata, dengan ketidaksetaraan antara

perempuan dan laki-laki mengakibatkan keterbatasan hak politik perempuan yang masih diatur oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman terhadap Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan, khususnya dalam konteks Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat di ketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang.

### **D. Tinjauan Pustaka**

*Pertama*, dalam jurnal yang ditulis oleh Rahmi Mulyasih berjudul 'Pentingnya Literasi Media Bagi Kaum Perempuan. Penelitian ini berfokus pada pentingnya literasi media bagi perempuan, hal ini karena perempuan adalah tokoh utama dalam sebuah keluarga, lahirnya generasi muda berkualitas yang penting peran perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya budaya literasi pada perempuan, yang pada akhirnya dapat akibat terbiasanya anak-anak menonton aksi kekerasan dan

rendahnya nilai-nilai humanis yang didapat anak sejak usia dini sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya dan perilaku generasi muda generasi yang jauh dari nilai-nilai agama dan masyarakat (Rahmi Mulyasih, n.d.)

*Kedua*, dalam jurnal yang ditulis oleh Muh Fathoni Hasyim berjudul Literasi Politik Komunitas Samin di Bojonegoro dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah. Kajian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana literasi politik komunitas Samin dalam menyuarakan aspirasinya pada Pemilu dalam perspektif Fiqh Siyasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat literasi politik masyarakat Samin semakin meningkat. Indikatornya bahwa antusiasme masyarakat Samin dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu, baik Pilkada, Pilpres maupun Pileg. Masyarakat Samin dalam menghadapi Pemilu, biasanya mengadakan musyawarah antarwarga yang dipimpin kepala adat, untuk menentukan arah pilihan aspirasi politiknya. Seiring berjalannya waktu tradisi tersebut meskipun tetap berlaku, tetapi hasil keputusannya tidak mengikat. Artinya, masyarakat Samin diberikan kebebasan menentukan pilihannya masing-masing. Hal ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang menjadikan hasil musyawarah sebagai keputusan bersama dalam menentukan aspirasi politiknya (Muh Fathoni Hasyim, 2020)

*Ketiga*, dalam jurnal yang dikarang oleh Nur Faizin berjudul 'Islam dan Peran Politik Perempuan (Studi terhadap Partai Keadilan Sejahtera DIY Pasca Pemilu 2004)', penelitian ini membahas bahwa secara



konseptual, PKS tidak melihat ada hambatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan teori peran politik perempuan. Dari hasil penelitian Nur Faizin, disimpulkan bahwa PKS DIY memberikan peluang yang signifikan bagi partisipasi perempuan dalam dunia politik dengan menciptakan sistem yang responsif dan mendukung kaum perempuan. Oleh karena itu, perempuan tidak mengalami banyak kendala dalam berperan aktif dalam arena politik (Faizin, 2007)

*Keempat*, dalam jurnal yang disusun oleh Tri Martuti berjudul 'Konsistensi PKS Dalam Memperjuangkan Harkat Dan Martabat Perempuan (Studi Pada: DPD PKS Lampung Utara)', skripsi ini mengulas tentang konsistensi PKS dalam melawan untuk meningkatkan posisi dan martabat perempuan. Perdebatan panjang terkait peran politik perempuan di Indonesia masih terus berlangsung. Salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap sistem politik adalah pandangan masyarakat yang memandang perempuan hanya sesuai untuk peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga dan dianggap tidak sesuai untuk berperan aktif dalam kehidupan publik. Dengan menerapkan teori konsistensi, penelitian ini mengungkapkan bahwa PKS secara konsisten berusaha meningkatkan posisi dan martabat perempuan di Lampung Utara melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi dengan konsep dan platform PKS. Tujuannya adalah mendorong terciptanya kemitraan yang saling mendukung antara

perempuan dan laki-laki, untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang taqwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudi daya (Tri Martuti, 2018)

*Kelima*, Jurnal karya Ali Candra Kusuma Penelitian ini, yang berjudul "Hak Konstitusional Kader Perempuan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Madiun Dalam Pandangan Fiqih Siyasah," mengkaji usaha yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun untuk menjaga hak-hak konstitusional kader perempuannya dalam konteks hukum Islam (Fiqh Siyasah). Penting untuk menekankan hal ini karena PKS merupakan salah satu partai yang berbasis Islam dalam pemilu, dan dalam perspektif Islam, perempuan memiliki kedudukan yang berbeda dengan laki-laki. Dengan menerapkan konsep hak konstitusional, penelitian menyimpulkan bahwa DPD PKS Kota Madiun telah berupaya melindungi hak-hak konstitusional kader perempuannya dan sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah. Namun, perlu ditekankan bahwa PKS Kota Madiun belum sepenuhnya memenuhi kuota 30% perempuan. Hal ini seharusnya bukan hanya sebagai kewajiban mengikuti regulasi pemerintah, melainkan juga harus muncul dari kesadaran bahwa regulasi yang melibatkan hak-hak perempuan seharusnya dihasilkan melalui partisipasi aktif mereka dalam proses legislatif. Tanpa keterlibatan yang aktif, dapat dipastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak akan sepenuhnya mengakomodasi dan melindungi hak-hak perempuan (Ali Candra Kusuma, 2017)

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Politik Gender**

Gender merupakan suatu konstruksi sosial di dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, dan lingkungan etnis. Penting untuk dicatat bahwa gender tidak hanya terkait dengan jenis kelamin, melainkan dapat ditemui baik pada laki-laki maupun perempuan. Saat ini, konsep gender menimbulkan berbagai penafsiran dan makna yang belum sepenuhnya menggambarkan esensi dari gender itu sendiri. Isu gender mulai aktif dibahas sekitar akhir tahun 1960 dan terus berkembang menjadi topik diskusi dalam berbagai seminar dan presentasi kertas kerja mengenai perubahan sosial dalam masyarakat. Gender dianggap sebagai fenomena sosial yang relatif dan kontekstual, bergantung pada konstruksi sosial dari masyarakat tertentu (Rasyidin, 2016)

### **2. Teori Hak Politik**

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah "hak" merujuk pada suatu hal yang benar, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau hak untuk menuntut sesuatu, juga mencakup derajat atau martabat. Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada individu dengan tujuan melindungi kepentingan individu tersebut. (Marwan Mas, 2010)

Menurut K. Bertens, hak dapat diartikan sebagai tuntutan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain atau masyarakat. Seseorang yang memiliki hak memiliki kemampuan untuk menuntut (bukan hanya berharap atau mengusulkan) agar individu lain menghormati hak tersebut. Namun, penting untuk menambahkan bahwa hak adalah tuntutan yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan (Muhammad Erwin, n.d.)

### **3. Teori Politik Pembangunan**

Dalam kajian politik pembangunan, terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menguraikan definisi politik dalam pembangunan, yakni perubahan, pembangunan, dan modernisasi politik. Perubahan politik mengacu pada perbedaan karakteristik suatu sistem politik dari suatu periode ke periode lainnya atau dari satu sistem politik ke sistem politik lainnya. Sebagai contoh, perubahan politik dapat mencakup peralihan dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila. Pembangunan dan modernisasi politik, dalam konteks ini, dianggap sebagai hasil dari perubahan politik, dan bukan sebaliknya. Politik pembangunan dilihat sebagai konsekuensi politik dari proses pembangunan yang bertujuan, antara lain, untuk mengembangkan kapasitas sistem politik sehingga mampu mempertahankan dirinya (Ramlan Surbakti, 1992)

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna lebih diutamakan. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan realitas di lapangan. Selanjutnya, teori ini dikonsultasikan dengan pihak yang berkompeten mengenai isu hak-hak politik perempuan. Informasi yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah penelitian.

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diambil dari lapangan (enumerator) yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. Penulis mewawancarai sekretaris DPD PKS, Ketua BPKK dan masyarakat setempat sebagai informan secara langsung untuk mencari informasi tentang bagaimana literasi hak-hak politik kaum perempuan studi pada program pembangunan perempuan dan kepemudaan

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait atau pihak lain). Data sekunder merupakan data tambahan berupa

informasi yang akan melengkapi data primer. Tambahan yang dimaksud berupa dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto sebagai pendukung terkait dengan masalah literasi hak-hak politik kaum perempuan studi pada program pembangunan perempuan dan kepemudaan

### **3. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan terhadap partai politik di Kota Palembang, dengan focus kajian menganalisis Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan wawancara secara langsung kepada sekretaris DPD PKS dan ketua BPKK. PKS adalah salah satu partai politik yang signifikan di Indonesia. Melakukan penelitian di dalamnya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik lokal, strategi partai, dan agenda politik yang dianut oleh partai tersebut di tingkat kota Palembang.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog tanya jawab yang sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan mencakup wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti melakukan pertanyaan dan jawaban secara bebas berdasarkan pedoman wawancara. Pertanyaan-pertanyaan ini

ditujukan kepada informan penelitian, yang meliputi pengurus DPD PKS, Pengurus Bidang Kewanitaan, dan kader politik perempuan DPD PKS.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pendekatan yang memanfaatkan dokumen-dokumen sebagai sumber data, seperti catatan, buku, dan surat kabar yang terdapat di DPD PKS. Data yang dihimpun melibatkan informasi mengenai sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi partai politik, serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DPD PKS, khususnya terkait perjuangan hak-hak politik perempuan dalam program pembangunan perempuan dan kepemudaan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Tahap analisis data merupakan fase kritis dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Proses analisis data melibatkan tiga subproses yang bersinergi, artinya reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi akan digunakan untuk menyajikan hasil dari penelitian ini.

## **6. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini secara jelas akan membahas beberapa masalah yang dikelompokkan ke dalam lima bab, yaitu:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

## **BAB III PROFIL DPD PKS KOTA PALEMBANG**

Pada bab ini dijelaskan tentang profil DPD PKS Kota Palembang

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Literasi Hak-hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saransaran



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Politik**

Hak merujuk pada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari kedudukan atau statusnya. Hak ini mencakup sejumlah kewenangan yang melekat sepanjang kehidupan seseorang, mulai dari kelahiran hingga meninggal dunia, dan muncul dalam konteks interaksi sosial dengan orang lain (Theo Huijbers, 1990)

Menurut interpretasi dalam Kamus Bahasa Indonesia, politik merujuk pada segala aspek yang terkait dengan sistem pemerintahan dan urusan yang melibatkan strategi dalam pengelolaan negara. Secara umum, politik diartikan sebagai usaha untuk menetapkan norma-norma yang dapat diterima oleh sebagian besar penduduk, dengan tujuan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang seimbang. Peter Merkl, di sisi lain, mengungkapkan bahwa politik, dalam bentuk yang positif, adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan dalam bentuk negatifnya, politik menjadi perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (Miriam Budiardjo, 2010)

Demikianlah, hak politik merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap individu untuk mencapai, merebut, dan memanfaatkan kekuasaan, kedudukan, serta kekayaan yang bermanfaat bagi dirinya. Sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, dengan prinsip persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak politik ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk pemilihan umum (Pemilu), yang menjadi sarana utama bagi warga negara untuk menyalurkan hak politik mereka. Dalam hak politik, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis, serta dapat berpartisipasi dalam organisasi politik dan turut serta dalam kegiatan kampanye pemilu. Pemberian hak politik kepada warga negara bukan hanya sebagai hak konstitusional semata, tetapi juga sebagai cara untuk masyarakat menyuarkan aspirasi dan terlibat dalam urusan pemerintahan merupakan hal yang diperbolehkan. Tambahan pula, hak politik diberikan oleh negara dengan maksud untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahi hak-hak warga, dan sekaligus memberikan peluang yang setara bagi setiap orang dalam berpartisipasi dalam urusan pemerintahan (Adrianus Bawamenewi, 2019)

Keberadaan perempuan dalam partai politik mencerminkan kemajuan pemikiran terkait pekerjaan dan profesi. Pandangan masyarakat yang mengidentifikasi perempuan hanya dalam peran rumah tangga perlahan-lahan berubah seiring terlibatnya perempuan dalam dunia partai politik. Milbraith mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong

partisipasi dalam politik, seperti terlibat dalam debat atau diskusi politik, kepedulian terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya, serta status sosial, ekonomi, etnis, dan agama yang memengaruhi persepsi politik. Lingkungan politik yang kondusif dan demokratis juga dapat mendekatkan seseorang pada keterlibatan politik.

Di era milenial saat ini, kesadaran perempuan terhadap pentingnya peran mereka dalam partai politik semakin meningkat. Banyak perempuan yang beralih profesi menjadi kader partai politik dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam partai politik memiliki dampak signifikan, terutama dalam memperjuangkan hak-hak terkait keluarga, kesehatan, dan isu-isu lainnya. Perempuan di dunia politik berusaha memberikan argumen yang kuat di legislatif untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan di negara ini diakui dan dilindungi. Tuntutan juga disampaikan kepada pemerintah agar lebih peka terhadap isu-isu yang berhubungan dengan anak dan perempuan. Selain memperjuangkan isu-isu tersebut, perempuan berupaya menyelesaikan masalah tanpa kehilangan sifat kewanitaannya (Fitriyah, 2012)

Peran perempuan dalam politik semakin menguat pada masa sekarang, terlihat dari peningkatan jumlah kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan bahkan para menteri yang dipegang oleh perempuan. Tidak hanya sekadar menempati jabatan, namun keberdayaan mereka memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan Indonesia.

Peran perempuan dalam politik semakin menguat pada masa sekarang, terlihat dari peningkatan jumlah kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan bahkan para menteri yang dipegang oleh perempuan. Tidak hanya sekadar menempati jabatan, namun keberdayaan mereka memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan Indonesia. Peran perempuan dalam politik Indonesia memberikan warna khusus, dan dengan segala ciri khas kewanitaannya, mereka melengkapi lanskap politik di Indonesia. Partisipasi dan representasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan langkah konkret untuk mencapai kesetaraan bagi perempuan.

Keberadaan perempuan di dunia politik Indonesia sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks pembangunan dan masa depan negara ini. Perempuan perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang memadai, dan aktivis perempuan harus terus berupaya meningkatkan keterampilan serta terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan pemahaman. Peran pemerintah dan partai politik sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan politik kepada kader perempuan, sehingga mereka dapat berperan di lembaga legislatif. Rekrutmen perempuan dan persiapan mereka sebagai kader harus dilakukan dengan memberikan dukungan penuh agar mereka dapat secara efektif memperjuangkan hak-hak perempuan (Andriana Wulandari, 2023)

Perempuan juga memiliki peluang dan kesempatan untuk terlibat dalam merumuskan kebijakan di daerahnya. Pandangan perempuan

terhadap dunia politik sangat terkait dengan minat mereka untuk terlibat dalam politik. Setiap individu di dalam ranah politik memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pemilihan dan memilih. Secara khusus, politik tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, melainkan lebih kepada kemampuan individu dalam memberikan dampak positif dan perubahan yang baik dalam suatu daerah. Masyarakat saat ini mendambakan praktik politik yang lebih sehat, di mana politik bukan hanya terkait dengan kepentingan materi dan posisi, tetapi juga merupakan sarana untuk memperbaiki kehidupan bersama.

Saat ini, masyarakat sudah berharap agar politik lebih bersih dan tidak hanya terkait dengan kepentingan pribadi atau partai politik tertentu. Negara dan pemerintah memberikan kesempatan besar kepada perempuan untuk berperan dalam politik tanpa adanya diskriminasi seperti pada masa lalu di mana perempuan terbatas pada peran di rumah saja. Perempuan saat ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kualifikasi yang baik, dan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga dalam dunia politik.

Meskipun peluang terus terbuka bagi eksistensi perempuan di bidang politik, namun perlu dihindari pikiran-pikiran yang dapat menghambat minat mereka untuk berpartisipasi. Negara dan daerah masih membutuhkan peran perempuan untuk bersama-sama berjuang mencapai kesejahteraan bersama. Politik bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebuah kekuatan dan kemampuan yang perlu diasah terus-menerus untuk

memperoleh kekuasaan dengan membekali diri dengan pengalaman dan pemahaman yang matang serta niat tulus untuk kesejahteraan bersama.

Perempuan telah diberikan kesempatan untuk berpolitik demi pembangunan bangsa dan negara. Meski demikian, peluang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh perempuan. Bagi perempuan yang berminat dalam politik dan kepemimpinan, disarankan untuk mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Meskipun sekarang tidak ada lagi diskriminasi atau marginalisasi terhadap perempuan, masih terdapat kendala seperti kurangnya dukungan partai politik dalam mencalonkan kader perempuan dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, negara dan daerah membutuhkan perempuan berkualitas yang dapat memberikan kontribusi pikiran dan tenaga bersama kaum laki-laki untuk membangun bangsa yang lebih baik. Meski ada kesulitan dalam mendapatkan kader perempuan yang tepat, tetapi perempuan dapat berperan secara aktif dalam politik dengan niat tulus untuk kesejahteraan bersama (Riswanda Himawan, 2003)

Definisi kader perempuan dalam lingkup partai politik tidak harus diartikan secara kaku, yaitu bahwa keterlibatan dalam politik hanya berarti hasrat yang berlebihan untuk mencalonkan diri dalam berbagai jabatan, seperti anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, atau bahkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik mencerminkan karakter politik dan kesadaran politik mereka dalam menjalankan hak-hak politik. Partisipasi politik perempuan

dalam partai politik mencakup beragam konteks, seperti menginisiasi program atau kegiatan partai, berperan aktif dalam perdebatan untuk menentukan kebijakan partai, terlibat dalam kepengurusan partai, mendukung program partai di masyarakat, mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, atau pemilihan presiden dan wakil presiden, serta memberikan pencerahan dan sosialisasi politik kepada masyarakat sebagai representasi partai dalam memenuhi fungsi-fungsi politiknya (Samuel Huntington, 1997)

Pelatihan kader memiliki peran sentral dalam penyampaian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan di bidang politik. Proses kaderisasi merupakan tahap persiapan sumber daya manusia agar dapat menjadi pemimpin yang mampu meningkatkan peran dan fungsi organisasi secara lebih efektif. Bagi perempuan yang menjadi kader partai dan ingin menduduki jabatan-jabatan publik yang membutuhkan kualifikasi, penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan politik yang terstruktur, komprehensif, serta memperhatikan strategi, materi, dan metode yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik perempuan itu sendiri.

## **B. Politik Gender**

Istilah gender pertama kali diperkenalkan di Barat pada sekitar tahun 1980 dan secara resmi diresmikan, meskipun sebenarnya telah ada sejak tahun 1960-an dengan istilah feminisme (Skolnick, 1960). Gender diartikan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara

perempuan dan laki-laki, yang melibatkan faktor bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan unsur yang dipelajari serta disosialisasikan melalui budaya sejak masa kecil. Meskipun istilah gender belum termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaannya kemudian selalu terkait dengan konteks budaya. Istilah gender lebih sering digunakan untuk merujuk pada perbedaan status dan peran laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang berlangsung lama (Azyumardi Azra, 2008)

Konsep gender juga dapat berfungsi sebagai alat analisis yang efektif untuk menggali masalah diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh. Ditegaskan bahwa gender merupakan suatu konstruksi sosial dan budaya yang membagi peran antara laki-laki dan perempuan. Dijelaskan bahwa perbedaan gender ini muncul melalui serangkaian proses yang kompleks, seperti sosialisasi, penguatan, konstruksi, aspek sosial budaya, dan bahkan melibatkan kekuasaan negara. Proses "genderisasi" dalam konteks sosial budaya berlangsung begitu lama sehingga perlahan-lahan perbedaan gender dianggap sebagai konstruksi sosial budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kodrat atau sifat biologis yang tidak dapat diubah. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat percaya bahwa kodrat wanita adalah hasil konstruksi sosial budaya atau gender. Gender memengaruhi keyakinan individu dan budaya masyarakat mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berpikir dan bertindak sesuai dengan norma sosial tersebut. Perbedaan



yang ditetapkan oleh norma masyarakat, bukan oleh faktor biologis, dianggap sebagai kehendak Tuhan (Febriasih, 2008)

Gender adalah aspek yang harus diperhitungkan dalam semua kebijakan, perencanaan, dan proses pembangunan, karena gender membantu dalam pemahaman yang lebih baik terhadap sikap, kebutuhan, dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor sosial. Namun, permasalahan di atas menunjukkan bahwa hubungan antara teks dan konteks, serta interpretasi yang terjadi, menunjukkan ketidaksetaraan dan bahkan mendorong berbagai pihak untuk memberikan penafsiran ganda terhadap peran perempuan di dunia politik, sehingga berpotensi menciptakan ketidakjelasan dalam pemenuhan hak-hak perempuan.

Kita seharusnya mengapresiasi perjuangan kaum perempuan di arena legislatif, aktivis perempuan, dan para feminis yang menginginkan dukungan untuk affirmative action. Harapannya adalah agar terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif serta lembaga pengambil keputusan lainnya. Dengan demikian, kebijakan publik atau politik tidak akan bersifat bias gender, melainkan akan meredakan ketegangan politik yang semakin memanas. Terlibat dalam dunia politik bukan berarti perempuan harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota, atau presiden. Namun, berperan aktif di ranah politik mencerminkan kemampuan intelegensia sekaligus menjadi aktualisasi diri bagi kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya

membuka akses bagi mereka untuk turut menentukan kebijakan publik, tetapi juga karena masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari sebagian besar juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga menjadi persoalan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perempuan memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengawasi implementasi kebijakan politik itu sendiri.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik, terutama di Negara-negara berkembang, sering kali sulit dibayangkan. Hal ini disebabkan oleh pembentukan budaya yang memandang perempuan sebatas untuk urusan rumah tangga, sementara politik yang sering kali dihubungkan dengan kekuasaan, umumnya dianggap sebagai ranah yang lebih cocok bagi kaum laki-laki. Pandangan ini muncul karena perempuan dianggap masih menjadi topik yang tabu dan kontroversial dalam konteks kepemimpinan. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai konsep pembangunan perempuan menjadi suatu kebutuhan mendesak. Terutama, pemberdayaan perempuan dalam aspek hak-hak politik sebagai penguatan dalam ranah publik harus terus diupayakan dengan serius agar dapat meningkatkan efektivitasnya (Liza Hadiz, 2004)

Secara global, perempuan masih sering diabaikan dalam struktur kepengurusan yang menentukan prioritas politik dan legislasi. Dalam proses pembangunan, perempuan cenderung menjadi objek lebih daripada subjek, dan partisipasi serta keterlibatan perempuan sering terbatas pada

tingkat konseptual. Mereka tidak diberi ruang untuk mengambil bagian dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri. Isu kesetaraan gender mendapatkan perhatian yang signifikan dalam perdebatan politik di Indonesia, mengakibatkan adanya isu ketidakadilan gender dan diskriminasi gender karena persepsi perempuan sebagai sosok yang bersifat domestik.

Namun, terjadi perubahan dalam kebijakan yang mengakui kebutuhan perempuan untuk lebih terlibat dalam ruang publik. Kini, perempuan tidak hanya diharapkan memasuki dunia publik, tetapi juga diakui bahwa pemikiran mereka sangat dibutuhkan. Sementara itu, ada kesadaran bahwa laki-laki juga perlu terlibat lebih intensif dalam kegiatan yang bersifat domestik, mengingat bahwa keduanya memiliki nilai yang setara. Perubahan dalam peran gender ini tidak selalu harus identik antara laki-laki dan perempuan, karena ada wilayah-wilayah tertentu yang dapat dijalankan oleh laki-laki tetapi tidak bisa dilakukan oleh perempuan, dan sebaliknya (Siti Anisa, 2016)

Namun, akhir-akhir ini kemajuan akses perempuan dalam dunia politik mulai terlihat melalui peningkatan partisipasi mereka dalam politik praktis. Saat ini, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam lembaga legislatif, birokrasi, dan berbagai jabatan politik lainnya. Semakin terbukanya pintu akses politik, akan semakin banyak perempuan yang mampu bersaing dengan pria dalam arena publik. Oleh karena itu, pemberian kuota untuk perempuan dalam politik saat ini mencerminkan

pengakuan yang luas terhadap hak-hak politik mereka. Meskipun demikian, keberadaan hak-hak tersebut tidak menjamin terciptanya sistem politik yang benar-benar demokratis, di mana prinsip-prinsip partisipasi, representasi, dan akuntabilitas memiliki makna yang nyata.

### **C. Politik Pembangunan**

Politik pembangunan telah menjadi salah satu isu sentral yang hampir meliputi seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang. Tidak hanya dijadikan salah satu program nasional, melainkan menjadi suatu obyek studi pula yang mengundang kaitan-kaitan luas, teoritis maupun praktis. Keterkaitan partai politik terhadap pembangunan meliputi sekurang-kurangnya empat masalah: pemersatuan bangsa, partisipasi politik, keabsahan dan penanganan atau pengolahan konflik. Setelah mengemukakan tiga jenis posisi partai politik yaitu sebagai alat elit yang berkuasa, sebagai mewakili golongan etnis eksklusif, dan sebagai sarana efektif meyarakan aspirasi setempat, ahli ini tidak dapat menempatkan dari tipe mana maupun sistem parpol mana yang menangani masalah utama pembangunan politik dikawasan bangsa-bangsa berkembang. Pada hakikatnya masa depan partai politik tergantung pada sejauh mana partai politik dan pemerintahannya berkemampuan menanggulangi krisis pembangunan politik (Andi Candra Jaya, n.d.)

Lucian W. Pye menyampaikan enam perspektif atau definisi mengenai politik pembangunan:

1. Suatu pandangan yang melihat politik pembangunan sebagai penciptaan kondisi politik dan sistem pemerintahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kehidupan ekonomi yang lebih maju.
2. Pendekatan yang menekankan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, yang mencakup peningkatan kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.
3. Perspektif yang menggambarkan perubahan dari keadaan tradisional menuju kondisi modern sebagai inti dari politik pembangunan.
4. Konsep yang melibatkan penyelenggaraan keseluruhan sistem, termasuk kemampuan administrasi dan kebijaksanaan pemerintah, untuk memenuhi tuntutan dan mengatasi berbagai tantangan.
5. Pendekatan yang melihat pembangunan sebagai upaya membangun bangsa dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra yang integral.
6. Suatu pandangan yang memandang pembangunan sebagai pembangunan demokrasi, di mana demokrasi memberikan penekanan pada hak kebebasan, kedaulatan rakyat, serta kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

Untuk membahas politik pembangunan di Indonesia akan lebih mendekati sasaran dengan bantuan ilmu politik dengan dijunjung oleh cabang-cabang ilmu sosial lainnya yang relevan. Konsisten dengan pendekatan semula disini pun tidak kecuali, peranan historis turut menonjol lainnya. Hal itu berhubungan wilayah luas lapangan politik dan

kehidupan politik. Tujuan politik pembangunan adalah sebagai integrasi politik, pemerintahan yang efisien, bersih, dan berwibawa di Indonesia pada masa orde baru, tujuan ini terdapat pada Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN LOKASI**

#### **A. Gambaran Umum Kota Palembang**

Secara geografis, Palembang terletak pada koordinat  $2^{\circ}59'27.99''$ LS dan  $104^{\circ}45'24.24''$ BT. Kota Palembang memiliki luas wilayah sebesar 400,61 km<sup>2</sup>, dengan ketinggian rata-rata mencapai 8 meter di atas permukaan laut. Keberadaan Palembang bersifat strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatra, yang menghubungkan berbagai daerah di Pulau Sumatra. Aksesibilitas ke Palembang juga dapat ditempuh melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung, Bengkulu, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan (via Pangkal Pinang), Jambi, Lubuk Linggau, Padang, Pekanbaru, Batam, Medan, dan Denpasar-Bali. Palembang juga dapat dicapai dari negara asing, seperti Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah (pada musim haji). Selain itu, kota ini dilalui oleh Sungai Musi yang terhubung oleh Jembatan Ampera, berfungsi sebagai jalur transportasi dan perdagangan antar wilayah (Wikipedia, 2023)

Sejarah Palembang mencakup masa ketika kota ini menjadi pusat kerajaan maritim Buddha terbesar di Asia Tenggara, yaitu Kedatuan Sriwijaya pada abad ke-9. Sriwijaya menguasai wilayah Nusantara dan Semenanjung Malaya. Karena peran tersebut, Palembang dijuluki "Bumi Sriwijaya". Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, yang ditemukan di Bukit

Siguntang di sebelah Barat Kota Palembang dan menyatakan pembentukan suatu kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, membuat Palembang dianggap sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia Barat, Palembang juga disebut "Venice of the East" ("Venice dari Timur") dan Serambi Hadramaut. Gelar Serambi Hadramaut diberikan karena beberapa Habaib yang memiliki gelar tersebut hanya terdapat di Palembang dan tidak ditemui di daerah lain di Indonesia.

## **B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya dikenal dengan nama Partai Keadilan (PK), merupakan sebuah partai politik yang berakar pada prinsip Islam di Indonesia. PKS secara resmi didirikan di Jakarta pada tanggal 20 April 2002, mewarisi perjalanan partai sebelumnya yang bernama Partai Keadilan (PK), yang telah berdiri sejak 20 Juli 1998 di Jakarta (26 Rabi'ul Awwal 1419 H) (Zuly Qodir, 2012). Pada tanggal 20 Juli 1998, Partai Keadilan (PKS) didirikan dengan nama awal Partai Keadilan (PK) dalam suatu konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Ketua partai ini saat itu adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada tanggal 20 Oktober 1999, PK menerima tawaran kursi di kementerian kehutanan dan perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. Nurmahmudi Isma'il yang saat itu menjabat sebagai presiden partai diangkat sebagai calon menteri.



Akibatnya, Nurmahmudi mengundurkan diri dari jabatan presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid pada 21 Mei 2000.

Pada tanggal 3 Agustus 2000, delapan partai Islam, termasuk PKS, menggelar acara sarasehan dan silaturahmi di Masjid Al-Azhar, meminta agar Piagam Jakarta dimasukkan dalam Amandemen UUD 1945. Akibat Undang-Undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan partai politik pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) sebesar dua persen, PK harus mengubah namanya agar dapat ikut kembali dalam pemilu berikutnya.

Pada tanggal 2 Juli 2003, PKS menyelesaikan proses verifikasi di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah, serta bergabung dengan PK. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan kader-kader partai. PK resmi berubah nama menjadi PKS.

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan presiden PKS setelah terpilih sebagai ketua MPR. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26–29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PKS periode 2005-2010. Setelah Tifatul Sembiring diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Luthfi Hasan Ishaq menjadi Pelaksana Jabatan Sementara (pjs) Presiden PKS. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16-20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PKS periode 2010-2015.

Pada tanggal 30 Mei 1999, delapan partai politik berbasis Islam, termasuk PKS, membentuk suatu kesepakatan. Pada 8 Juni 2002, PKS menjadi salah satu partai yang menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999, dan dari Maret hingga Juni 2003, PKS terlibat dalam serangkaian kegiatan yang mendukung partai tersebut. Ketika Pemilu 2004 tiba, PKS berhasil meraih dukungan sebanyak 7,34% dari total suara dan memperoleh 45 kursi di DPRD. Pada tanggal 9 Juli 2008, PKS memperoleh nomor urut 8 untuk ikut serta dalam Pemilu 2009. Dalam hasil Pemilu Umum Anggota DPR 2009, PKS meraih 57 kursi. Menjadi satu-satunya partai, selain Demokrat, yang mengalami peningkatan persentase perolehan suara, PKS menetapkan identitasnya sebagai partai Islam. Beberapa anggota parlemen PKS di wilayah Indonesia Timur bahkan beragama non-Islam.

PKS juga menegaskan peran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai sayap muda partai, di mana gerakan Tarbiyah menjadi salah satu aspek pengajaran. Prinsip-prinsip pendidikan ini diilhami oleh pemikiran Sayyid Qutb dan Yusuf Qordhowi. Lebih lanjut, PKS menggunakan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai sumber untuk merekrut kader-kadernya.

### **C. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang**

Partai Keadilan Sejahtera masih aktif sebagai salah satu partai Islam di Indonesia, terutama di kota Palembang, hingga saat ini. Progres Partai Keadilan Sejahtera di Palembang mencerminkan perkembangan umum PKS, yang merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan

selama masa reformasi tahun 1998. Partai ini menekankan aspek ke-Islaman sebagai prinsip dasarnya, menyatakan diri sebagai partai dakwah, dan terkenal sebagai partai yang memiliki kader-kader dengan tingkat militansi dan loyalitas yang tinggi (Rangga Eka Saputra, 2014).

Bagi pengurus PKS di tingkat kabupaten/kota, mereka dikenal sebagai DPD (Dewan Pengurus Daerah). Lokasi DPD Partai Keadilan Sejahtera di kota Palembang, Sumatera Selatan, berada di Jalan Letnan Murod, Kecamatan Ilir Timur I, Km.5. Pendirian Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera di kota Palembang bertujuan sebagai wadah untuk mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi umat Islam, terutama, serta masyarakat umum di Palembang. Saat ini, posisi Ketua Umum DPD PKS kota Palembang dipegang oleh Ir. H. Baharudin, MM.

#### **D. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

##### **1. Visi**

Menjadi Partai Islam yang teguh dan terkemuka dalam pelayanan kepada rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip rahmatan lil 'alamin. Arti dari rahmatan lil 'alamin adalah kehadiran Islam yang mampu menciptakan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta di tengah kehidupan masyarakat.

##### **2. Misi**

- a. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Anggota Partai sambil memperkuat integritas, solidaritas, akseptabilitas, dan profesionalitas untuk

menciptakan kepemimpinan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

- b. Mengokohkan soliditas Partai secara nasional, mandiri, dan terbuka agar dapat melaksanakan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern guna meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.
- c. Menetapkan soliditas Partai dalam skala nasional, mandiri, dan terbuka agar dapat melaksanakan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.
- d. Meraih kemenangan dalam Pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi Partai dalam merumuskan dan memperjuangkan kebijakan publik yang mengutamakan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ikut serta dalam mengembangkan demokratisasi di kawasan serta memperluas kerjasama internasional untuk memperkuat posisi Indonesia.

#### **E. Makna Lambang Baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Makna yang terkandung dari lambang Partai Keadilan Sejahtera yang baru yaitu Mars dan Hymne menjadi, sebagai berikut:



- a. Mars dan Hymne sebagai sumber semangat baru PKS dalam perjalanan bersama dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara.
- b. Lingkaran melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah dalam perjuangan mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang berlandaskan Pancasila.
- c. Bulan Sabit mencerminkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menjaga keseimbangan, menyatukan sejarah, kejayaan, dan kelangsungan tatanan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara.
- d. Warna Orange melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang selalu optimistis, dan semangat muda.
- e. Warna Putih mencerminkan kebersihan, kesucian, ketulusan, ketulusan, dan kemuliaan, sementara warna hitam melambangkan tekad keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, kewibawaan, kepastian, aspirasi, dan perlindungan.

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang berlandaskan pada sistem kader, di mana kekuatan inti partai diperoleh dari partisipasi aktif para kader. Sesuai dengan ketentuan dalam AD-ART PKS Bagian IV Pasal 9, setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk menjadi anggota partai sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses kaderisasi di PKS bersifat bertingkat bergantung pada tingkat kualitas dan kesetiaan kader, dengan hierarki sebagai berikut:

- a. Anggota kader pendukung/terbina memiliki dua kelompok utama:
- 1) Kader Pemula, merujuk pada individu yang mengajukan permohonan keanggotaan partai, terdaftar di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS berhasil menyelesaikan Pelatihan Orientasi Partai.
  - 2) Anggota Kader Muda mencakup individu yang telah didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan berhasil menyelesaikan pelatihan dasar tingkat pertama.
- b. Anggota kader inti terdiri dari:
- 1) Kader Madya merujuk pada individu yang terdaftar oleh DPD dan telah menyelesaikan pelatihan dasar tingkat kedua.
  - 2) Kader Dewasa melibatkan individu yang terdaftar oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan berhasil menyelesaikan pelatihan lanjutan.
  - 3) Kader Ahli merujuk pada individu yang terdaftar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan berhasil menyelesaikan pelatihan tingkat tinggi.
  - 4) Kader Purna mencakup individu yang terdaftar oleh DPP dan telah menyelesaikan pelatihan tingkat ahli.
- c. Kader Kehormatan adalah individu yang memberikan kontribusi signifikan dalam perjuangan partai dan secara resmi diakui oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Jenjang keanggotaan kader ini mencerminkan proses kaderisasi dalam Partai Keadilan Sejahtera, di mana kenaikan jenjang dapat terjadi

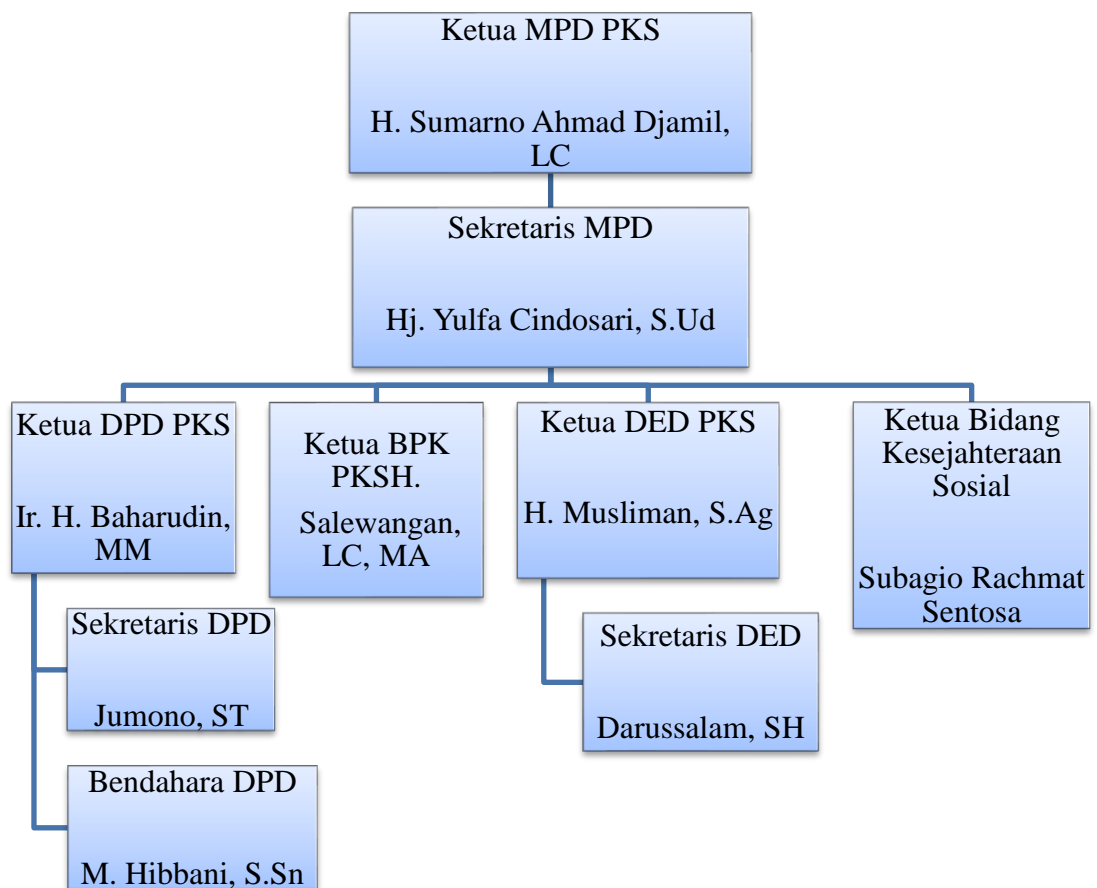
setelah memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditetapkan (*Melihat Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab IV Pasal 9, n.d.*)

#### F. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang menjadi salah satu lembaga yang memiliki struktur organisasi yang terpilih untuk periode 2020-2025, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPD PKS Kota Palembang

Periode 2020-2025



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan Dan Kepemudaan Di DPD PKS Kota Palembang**

Pada bagian ini, penulis menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian di DPD PKS Kota Palembang. Bab ini membahas temuan penelitian terkait Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan dalam Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang.

Hasil pemahaman dan partisipasi perempuan dalam aktivitas politik serta peningkatan kesadaran mereka terhadap hak-hak politik yang dimiliki, program ini dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan, kampanye, dan penyuluhan tentang hak-hak pemilih, partisipasi dalam kegiatan politik, dan peningkatan kapasitas agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Fokusnya mungkin juga mencakup mengatasi hambatan sosial dan budaya yang menghambat partisipasi politik perempuan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, tujuan dari program tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara dalam hal berpolitik antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jumono, ST, yang menjabat sebagai Sekretaris



DPD PKS Kota Palembang. (wawancara Bapak Jumono, ST selaku Sekretaris DPD PKS Kota Palembang, 08 Januari 2024)

"Bagi kami kita partai keadilan sejahtera partai islam kita menyakini atau mempedomani hadits rasulullah bahwa perempuan itu adalah tokoh guru dari sebuah negara. artinya dengan berlandasan itu saja kita sudah bersikap bahwa perempuan ini perlu perhatian khusus contohnya kami itu ada bidang perempuan dan ketahanan keluarga (BPKK) yang fokus pada kegiatan-kegiatan atau program yang memprogramkan bagaimana membangun perempuan dan kepemudaan dimana para kader mempunyai semangat muda, menggali seluruh potensi yang ada makanya ada juga bidang kepemudaan yang menggarap tentang milenialnya ada yang pemudanya memang sudah dewasa ada juga pemuda mahasiswa menjelang mau lulus dengan persiapan kerjanya ada program-program yang sesuai dengan sasarannya. Saya pribadi, melihat program pembangunan perempuan dan kepemudaan sebagai langkah positif dalam meningkatkan literasi hak-hak politik kaum perempuan. Karena, adanya perempuan dalam proses politik sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Program ini dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih memahami hak-hak politik mereka, mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin ada, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, saya mendukung program semacam ini karena dapat membangun perempuan dalam arena politik dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan hak-hak politik mereka."

Pernyataan tersebut menyiratkan pandangan positif terhadap Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan. Berikut adalah penjelasan dari pernyataan tersebut:

1. Pentingnya Program: Individu tersebut menganggap program ini sebagai langkah positif, menekankan pentingnya program tersebut dalam konteks pembangunan perempuan dan kepemudaan.

2. Mengatasi Hambatan: Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa program ini dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi perempuan dalam terlibat dalam dunia politik.
3. Peningkatan Literasi Politik: Terdapat penekanan pada peningkatan literasi hak-hak politik perempuan melalui program ini, menunjukkan tujuan untuk meningkatkan pemahaman perempuan terhadap hak politik yang mereka miliki.
4. Kontribusi pada Pembangunan Perempuan: Pernyataan tersebut menyoroti peran program dalam memajukan perempuan dalam arena politik, memberikan peluang kepada mereka untuk terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya pertanyaan kedua yang diajukan kepada Bapak Jumono, ST selaku Sekretaris DPD PKS jawabannya sebagai berikut:

“Kita mendorong penuh mereka menyusun program semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas, kemudian terkait masalah literasi hak-hak politiknya ya alhamdulillah sih kalau ketika para pengurus itu secara literasi hak-hak politik itu sudah pasti paham tentang dipilih dan memilih kemudian bagaimana dia memilih dipemilu pilpres kemudian ke pemahaman mereka terhadap program yang disampaikan pks, pada umumnya setiap partai atau organisasi yang memiliki program tersebut pasti memiliki langkah-langkah untuk meningkatkan literasi hak-hak politik perempuan yaitu seperti pendidikan dan pelatihan, kampanye pendidikan masyarakat, pembangunan politik perempuan, mengatasi hambatan, media dan informasi, rancangan kebijakan pro-perempuan, kerjasama dengan LSM dan komunitas.”

Dalam konteks ini, hasil wawancara diatas bahwasannya langkah-langkah konkret dapat bervariasi tergantung pada strategi dan prioritas

yang diambil oleh PKS dalam program pembangunan perempuan dan kepemudaan mereka. Informasi terkini dari sumber yang dapat dipercaya direkomendasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat mengenai inisiatif yang sedang berlangsung.

Selanjutnya peneliti masih mewawancarai Bapak Jumono, ST selaku Sekretaris DPD PKS Kota Palembang, bahwa:

“Kalau beda sih tetap ada antara perempuan dan laki-laki secara fitrahnya kita beda. Tapi kalau umpamanya dari segi hak-hak politik itu sama tapi memang kita tidak banyak hanya 30%. Persepsi terkait literasi hak politik bisa bermacam antara perempuan dan pria, terutama karena perbedaan pengalaman dan ekspektasi sosial yang mungkin mempengaruhi cara masing-masing kelompok melihat dan memahami hak politik. Ada beberapa perbedaan persepsi yang mungkin muncul dalam konteks program pembangunan perempuan dan kepemudaan yaitu Akses dan Partisipasi Politik, Kesadaran Hak-Hak Politik, Pemberdayaan Politik dan Kepemimpinan, Tantangan dan Hambatan, Partisipasi dalam Proses Keputusan, Peran Media dan Informasi.”

Dari pernyataan tersebut, ditekankan bahwa mengakui adanya variasi yang signifikan di antara individu dan kelompok adalah hal yang sangat penting. Program pembangunan yang efektif harus memperhitungkan perbedaan tersebut dan berusaha untuk mempromosikan literasi politik yang setara bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Mendorong adanya dialog terbuka antara perempuan dan pria, serta mengikutsertakan mereka secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, dapat membantu mengatasi perbedaan persepsi dan mendukung promosi kesetaraan gender dalam literasi politik.

Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya peneliti mewawancarai Ibu Fitri Damayanti, SE selaku ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, bahwa:

(wawancara Ibu Fitri Damayanti, 11 Januari 2024)

”Macam-macam program perempuan seperti sahabat anak, kajian ketahanan keluarga, kajian dalam hal politik. Di pks ini sekarang ada kegiatan yang untuk merekrut orang supaya senang dengan pks dengan cara pks menyapa masyarakat, program pembangunan ini kita membuat supaya perempuan indonesia ini melihat bahwa politik itu seperti ini guna meningkatkan literasi hak-hak politik mereka. Kalau melihat dari strategi khususnya ada, kita melakukan pendekatan secara langsung kepada ibu-ibu, kepemudaan melalui anak-anak maka dari itu kita membuat rumah baca yang dilakukan oleh kader pks jadi bisa kita edukasi, pelatihan literasi politik, pendidikan gender, partisipasi politik aktif, teknologi dan media sosial, jaringan dan dukungan serta evaluasi dan pemantauan. Salah satu program unggulan pks ini ada sci (sekolah cinta indonesia) yang berhasil diatas 50% ibu-ibu atau bapak-bapak masuk di program sci ini jadi caleg legislatif dari situ ada yang namanya bagian kepemudaan itu keluarga keadilan, gema keadilan nah itulah cara merekrut strategi yang dipakai kader pks ini jadi mudah dan berhasil, program pembangunan perempuan dan kepemudaan ini sendiri sering kali dirancang untuk mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan literasi hak-hak politik kaum perempuan. Kebijakan dan strategi dalam program semacam itu dapat mencakup langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk pembangunan perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik.”

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembangunan perempuan dan kepemudaan memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman hak-hak politik perempuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui bahwa setiap program pembangunan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal yang berbeda. Keterlibatan aktif masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan

pemuda, dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, juga dianggap sebagai faktor kunci untuk mencapai kesuksesan. Di samping itu, peneliti mengajukan pertanyaan lagi kepada Ibu Fitri Damayanti selaku Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan, bahwa:

“Ada dampak nya, perempuan lebih berpikir lagi bahwa makin banyak orang yang menjadi anggota dewan secara umum itu hak-hak nya semakin didengar, sebab literasi hak politik perempuan memiliki dampak yang signifikan pada perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. Ketika perempuan memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak politik mereka dan terlibat secara aktif dalam proses politik, ini dapat membawa perubahan positif yang melibatkan lebih banyak inklusivitas, kesetaraan, dan representasi. Saya lihat ada beberapa dampak dari literasi hak politik perempuan: Peningkatan Kesetaraan Gender, Partisipasi Politik yang Lebih Tinggi, Peningkatan Representasi Politik, Perubahan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi, Perubahan Budaya dan Norma Sosial, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Mendorong Perubahan Sosial Lebih Luas.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dan politik cenderung berjalan seiring dan memerlukan dukungan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Meningkatkan literasi hak politik perempuan melalui program pembangunan perempuan dan kepemudaan di lingkungan kepemudaan dapat mengarahkan perubahan menuju ke arah yang lebih demokratis, adil, dan inklusif.

Ketika membahas literasi hak-hak politik kaum perempuan studi pada program pembangunan perempuan dan kepemudaan, fokus pada partisipasi aktif kaum muda dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan hak politik perempuan menjadi sangat penting. Melalui upaya

ini, program pembangunan perempuan dan kepemudaan memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif kaum muda perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politik mereka sehingga dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat secara keseluruhan. Dan bisa kita simpulkan juga bahwa penerapan teori politik gender dalam analisis literasi hak-hak politik kaum perempuan dalam studi tentang program pembangunan perempuan dan kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang sejauh mana program-program tersebut memperjuangkan hak-hak politik kaum perempuan dan kepemudaan dengan mempertimbangkan dinamika gender dalam politik dan kekuasaan.

#### **B. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Program DPD PKS Tentang Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan Dan Kepemudaan**

Peneliti sudah mewawancarai beberapa pemuda atau masyarakat mengenai bagaimana Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang. Wawancara awal yang saya lakukan ini melibatkan Billi seorang pemuda umur 25 tahun, bahwa:

(wawancara Wahyu, 09 Januari 2024)

”Ya, literasi hak-hak politik kaum perempuan melalui program pembangunan perempuan dan kepemudaan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Karena menurut saya dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang literasi hak-hak politik perempuan, harapannya agar tercipta masyarakat

yang setara, dan mendukung partisipasi aktif semua warganya, tanpa memandang jenis kelamin.”

Dari uraian sebelumnya, melalui pemahaman hak politik perempuan, masyarakat dapat menggali pandangan yang lebih baik dan menyadari pentingnya kesetaraan gender dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Program pembangunan yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perubahan pemikiran dan perilaku masyarakat.

Disamping itu, Wahyu juga menyatakan materi atau kegiatan yang diselenggarakan dalam literasi hak-hak politik kaum perempuan studi pada program pembangunan perempuan dan kepemudaan ini yaitu:

“Apa yang saya lihat dalam penyampaian tersebut ada banyak sekali materi atau kegiatan yang disampaikan oleh pihak DPD PKS ini sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, seperti: sosialisasi hak-hak politik, pelatihan keterampilan kepemimpinan, diskusi panel dan seminar, advokasi dan kampanye kesetaraan gender, pelatihan pemahaman hukum, pertukaran pengalaman dan cerita sukses, simulasi pengambilan keputusan, Kegiatan Kolaboratif, ini dapat melibatkan pengukuran pemahaman masyarakat, tingkat partisipasi, dan perubahan perilaku terkait hak-hak politik perempuan.”

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggabungkan materi dan kegiatan, program literasi hak politik perempuan mampu membentuk lingkungan yang mendukung pengetahuan yang mendalam, partisipasi aktif, dan perubahan positif dalam pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam konteks politik.

(wawancara Lia, 09 Januari 2024)

“Menurut saya program pembangunan perempuan dan kepemudaan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan literasi hak-hak politik kaum perempuan ada beberapa kontribusi utama yang dapat diberikan oleh program semacam itu: pemberdayaan perempuan muda, pemahaman yang mendalam, meningkatkan partisipasi perempuan muda dalam politik, kegiatan sosialisasi dibidang politik.

Lia juga menyampaikan bahwa penting untuk diingat pada saat ini, upaya melalui program pembangunan perempuan dan kepemudaan telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan literasi hak-hak politik kaum perempuan. Berikut rangkuman hasil wawancara:

“Kalau menurut saya sendiri, hal tersebut dapat dikatakan meningkat karena apa yang telah disampaikan oleh pihak dpd pks membuat saya lebih berpikir lebih luas lagi mengenai hak-hak politik, sebab kita sebagai generasi muda harus bisa mengetahui hak-hak kita sendiri baik itu dari segi sehari-hari ataupun dari segi politik. Jadi dengan adanya program ini pemahaman pemuda tentang program tersebut mudah diterapkan di kehidupan masyarakat setempat ataupun pemuda saat ini.”

Untuk mengevaluasi apakah tingkat pengetahuan pemuda mengalami peningkatan atau tetap sama setelah mengikuti program tersebut, oleh karena itulah saya melakukan penelitian wawancara ini. Program pembangunan perempuan dan kepemudaan umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak politik kaum perempuan, sambil memberikan pendidikan dan dukungan untuk mencapai kesetaraan gender. Dampak dari program semacam itu dapat tercermin dalam peningkatan pemahaman pemuda terkait isu-isu gender,



peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, dan perubahan sikap terhadap isu-isu gender. Ini dapat dijadikan indikator untuk mengukur pengaruh program terhadap pengetahuan dan sikap pemuda terkait literasi hak-hak politik kaum perempuan.

Terakhir saya melakukan wawancara sejauh mana literasi hak-hak politik kaum perempuan studi pada program pembangunan perempuan dan kepemudaan ini memberikan dampak positif di dunia politik, hasil wawancaranya:

(wawancara Lia, 09 Januari 2024)

“Kalau menurut saya dampak positifnya jelas ada, karena dapat meningkatkan kesadaran perempuan terhadap hak-hak politik mereka. Melalui ini perempuan dapat mengetahui dan memahami peran serta tanggungjawab mereka dalam sistem politik.

Berdasarkan hasil wawancara dari penjelasan dan informasi yang diberikan oleh narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa responden sangat menyambut positif, dan sebagai langkah yang penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang. Sehingga bisa kita simpulkan juga pada umumnya, teori politik gender sangat sejalan dengan literasi hak-hak politik kaum perempuan yang terkait dengan program pembangunan perempuan dan kepemudaan mencakup berbagai pendekatan yang mendorong pengetahuan, pemberdayaan, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi hak-hak politik kaum perempuan studi pada program pembangunan perempuan dan kepemudaan

Dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan literasi hak-hak politik perempuan menjadi sangat penting karena melalui upaya program pembangunan perempuan dan kepemudaan memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif kaum muda perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politik mereka sehingga dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat secara keseluruhan. Dan bisa kita simpulkan juga bahwa penerapan teori politik gender dalam analisis literasi hak-hak politik kaum perempuan dalam studi tentang program pembangunan perempuan dan kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang sejauh mana program-program tersebut memperjuangkan hak-hak politik kaum perempuan dan kepemudaan dengan mempertimbangkan dinamika gender dalam politik dan kekuasaan.

2. Pengetahuan masyarakat mengenai literasi hak-hak politik kaum perempuan studi pada program pembangunan perempuan dan kepemudaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat sangat menyambut positif, dan sebagai langkah yang penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Literasi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan Studi Pada Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan di DPD PKS Kota Palembang. Sehingga bisa kita simpulkan juga pada umumnya, teori politik gender sangat sejalan dengan literasi hak-hak politik kaum perempuan yang terkait dengan program pembangunan perempuan dan kepemudaan mencakup berbagai pendekatan yang mendorong pengetahuan, pemberdayaan, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran yang dapat memberikan kontribusi positif untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak terkait. Saran-saran tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain:

### **1. Masyarakat/Pemuda**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi generasi muda dan masyarakat. Mereka dapat meningkatkan pemahaman mengenai literasi hak-hak politik perempuan melalui partisipasi dalam pelatihan dan program pendidikan politik. Pemuda dan masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan hak-hak politik terlindungi dan dihargai.

### **2. Pembaca**

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi pembaca, khususnya mahasiswa studi politik Islam.

### 3. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti yang akan melanjutkan studi mengenai literasi hak-hak politik kaum perempuan dalam konteks program pembangunan perempuan dan kepemudaan, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Bawamenewi. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Warta Edisi: 61*.
- Afriandi Setiawan. (2011). *Gender dan Pembangunan*.
- Ali Candra Kusuma. (2017). *Hak Konstitusional Kader Perempuan Pks (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Madiun Dalam Pandangan Fiqih Siyasah*.
- Andi Candra Jaya. (n.d.). *Politik Pembangunan Islam*.
- Andriana Wulandari. (2023). *Perempuan Indonesia Dalam Kancah Politik*.
- Azyumardi Azra. (2008). *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Kemasyarakatan (Bandung: Angkasa, 2008)*.
- Digital, G. (2019). *Kupas Tuntas Jenis dan Pengertian Literasi*.
- Fahri Abdillah. (2022). *Memahami Pengertian Literasi, Tujuan, Jenis & Contohnya*.
- Faizin, N. (2007). *Islam dan Peran Politik Perempuan (Studi terhadap Partai Keadilan Sejahtera DIY Pasca Pemilu 2004)*, dalam Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Febriasih. (2008). *Gender dan Demokrasi*.
- Fitriyah. (2012). *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Liza Hadiz. (2004). *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES.
- Marwan Mas, 2004. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Melihat Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab IV Pasal 9. (n.d.). 3–4.
- Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 15–16.
- Muh Fathoni Hasyim. (2020). *Literasi Politik Komunitas Samin di Bojonegoro dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah*.
- Muhaimin, A. (2009). *Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DI Yogyakarta*.
- Muhammad Erwin. (n.d.). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Mustafa As Sibay. (1962). *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*.
- Rahmi Mulyasih. (n.d.). *Pentingnya Literasi Media Bagi Kaum Perempuan*.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*.
- Rangga Eka Saputra. (2014). *Dinamika Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. 38.
- Rasyidin. (2016). *Gender dan Politik Keterwakilan Wanita dalam Politik*.
- Ratih Prabosiwi. (2015). *Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*.
- Riswanda Himawan. (2003). *Menjadi Pemilih yang Baik dalam Pemilu*.
- Samuel Huntington. (1997). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sibghatullah Arrasyid. (2020). *Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998-2017*.
- Siti Anisa. (2016). *Gender Sebagai Konstruksi Sosial*.
- Skolnick. (1960). *Gerakan Feminisme*.
- Theo Huijbers. (1990). *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta.
- Tri Martuti. (2018). *Konsistensi Pks Dalam Memperjuangkan Harkat Dan Martabat Perempuan (Studi Pada: DPD PKS Lampung Utara)*.
- Try Septiyantono. (2014). *Media dan Literasi: Perspektif Teori dan Praktik*.
- Wikipedia. (2023). *Sejarah Kota Palembang*.
- Zuly Qodir. (2012). *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)*.

## LAMPIRAN

**Wawancara dengan Sekretaris Dpd Pks Kota Plg, Bapak Jumono, ST**

**(Tgl 08 Januari 2024)**



(Sumber: Dokumentasi Penulis)

**Wawancara dengan Ketua Bpkk Dpd Pks Kota Plg, Ibu Fitri Damayanti, SE**

**(Tgl 08 Januari 2024)**



(Sumber: Dokumentasi Penulis)



**Wawancara dengan masyarakat atau pemuda Kota Palembang**

**(Tgl 09 Januari 2024)**



**(Wawancara dengan saudara Wahyu)**



**(Wawancara dengan saudari Lia)**

## Dokumentasi Kegiatan Program Pembangunan Perempuan dan Kepemudaan



## **Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber (DPD PKS)**

### **A. Subjek Penelitian**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang

### **B. Identitas Informan**

Nama :

Jabatan :

### **C. Pelaksanaan Wawancara**

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

### **D. Daftar Pertanyaan dan Tanggapan Informan**

1. Bagaimana pendapat anda terhadap hak-hak politik kaum perempuan dalam konteks program pembangunan perempuan dan kepemudaan?
2. Bagaimana pihak PKS menjalankan program pembangunan perempuan dan kepemudaan guna meningkatkan literasi hak politik kaum perempuan?
3. Apakah ada perbedaan persepsi antara perempuan dan pria terkait literasi hak politik dalam konteks program tersebut?
4. Apakah terdapat kebijakan atau strategi khusus dalam program tersebut yang mendukung peningkatan literasi hak politik kaum perempuan?
5. Bagaimana dampak literasi hak politik perempuan terhadap perubahan sosial dan politik dalam masyarakat?

## **Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber (Masyarakat/Pemuda)**

### **A. Subjek Penelitian**

Masyarakat Kota Palembang

### **B. Identitas Informan**

Nama :

Jabatan :

### **C. Pelaksanaan Wawancara**

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

### **D. Daftar Pertanyaan dan Tanggapan Informan**

1. Apakah program pembangunan perempuan dan kepemudaan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak politik kaum perempuan?
2. Apa saja materi atau kegiatan yang diselenggarakan dalam program untuk meningkatkan literasi hak politik perempuan?
3. Bagaimana program ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi hak-hak politik perempuan di tingkat masyarakat?
4. Bagaimana pemahaman anda setelah mendengarkan penyampaian tentang literasi hak-hak politik kaum perempuan melalui program pembangunan perempuan apa meningkat dengan adanya program ini atau sama saja?
5. Menurut anda, sejauh mana program pembangunan perempuan dan kepemudaan dapat memberikan dampak positif di dunia politik?

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Tiara

Temat & Tanggal Lahir : Pauh, 07 Mei 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Datuk Moh Akip Pusat Rumah Susun

Ayah : Asli

Ibu : Rita

Anak Ke : 3 Dari 3 Bersaudara

SSSNo. Telpon : 085383820102

Email : [tiaraaa.ar20002@gmail.com](mailto:tiaraaa.ar20002@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

2008 - 2014 : Sekolah Dasar Negeri 1 Pauh

2014 - 2017 : Mts Negeri 1 Kota Lubuklinggau

2017 - 2020 : Man 1 (Model) Kota Lubuklinggau

2020 - Sekarang : Uin Raden Fatah Palembang

